



Digital
Signature
hassle-free contract?







TECHNOLOGY EVOLUTION

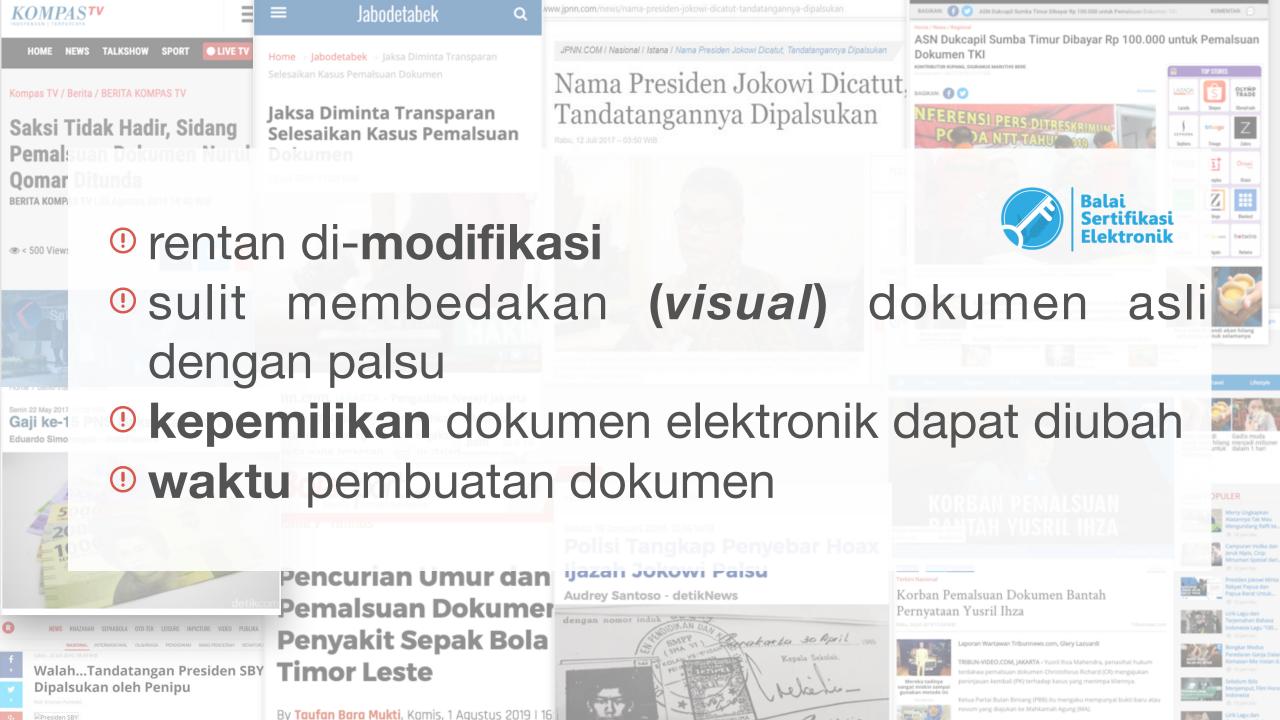
"Designed by vectorpocket / Freak"



		Jaminan	Verifikasi Jaminan	Aktor/Saksi Penjamin
	1	Tanda tangan basah	Spesimen tanda tangan didaftarkan, ditulis buku, kertas KTP (atau kartu identitas lainnya)	Kelurahan (Dukcapil), Bank, Notaris
	2	Keutuhan dan keabsahan konten	Para pihak pemegang document/kontrak/perjanjian	Para pihak, Saksi, Notaris
	3	Anti sangkal dan Persetujuan	Saksi pembubuhan tanda tangan	Saksi, Petugas Loket, Notaris

^{*} Proses penjaminan membutuh tatap muka (di-saksi-kan) dan verifikasi visual (di-bukti-kan)

Jaminan Tanda Tangan (basah)*





Pasal 5

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3)
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

UU ITE (UU No 11 Tahun 2008)

Pasal 60

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas Penanda Tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik meliputi:
 - a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
 - b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
- (3) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus:
 - a. memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3);
 - b. menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - c. dibuat dengan menggunakan Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
- (4) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.

PPPSTE (PP No. 71 Tahun 2019)





"Build Trust In Electronic Transactions"/

Jl. Harsono RM. No. 70, Ragunan, Jaksel ph: (+62) 21 780 5814

e: info.bsre@bssn.go.id